



▶ TPST DINGKIKAN

Proyek Jalan Masuk Terancam Molor

BANTUL—Realisasi pembangunan jalan masuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dingkikan, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu yang direncanakan selesai pada triwulan pertama 2025 kini terancam tidak tepat waktu.

Jumali
jumali@harianjogja.com

Hal ini sebagai dampak keluarnya Surat Edaran Bersama nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2-24, tertanggal 11 Desember 2024 yang isinya perintah agar Pemerintah Kabupaten (Pekab) Bantul menunda sejumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa bersumber anggaran Pemerintah Pusat pada 2025 untuk sementara waktu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Bambang Purwadi Nugroho menegaskan keluarnya

- ▶ SE itu bisa membuat molor proyek pengerjaan pembangunan jalan masuk TPST Dingkikan.
- ▶ DLH juga telah menambah alat pengering sampah berupa *rotary dryer* senilai Rp600 juta.

SE itu bisa membuat molor proyek pengerjaan pembangunan jalan masuk TPST Dingkikan yang dananya dianggarkan sebesar Rp2,7 miliar.

“Secara teknis silakan tanya ke PU [Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman] karena yang akan mengerjakannya,” ungkapnya kepada *Harian Jogja*, Sabtu (11/1).

Bambang menyebut pembangunan jalan tersebut sangat penting sebab keberadaan jalan tersebut akan mempermudah lalu lalang truk pengangkut sampah masuk ke TPST Dingkikan. Apalagi saat ini, tiga modul TPST Dingkikan yang mengolah sampah menjadi *refuse-derived fuel* (RDF) atau keripik sampah juga telah terbangun dan mulai beroperasi.

Selain itu, DLH juga telah menambah alat pengering sampah

berupa *rotary dryer* senilai Rp600 juta agar kualitas keripik sampah sesuai dengan spek dari PT SBI kantor Cilacap selaku pengguna RDF hasil olahan Dingkikan.

“Untuk 2025 DLH masih fokus pengoptimalan keberadaan TPST Modalan, TPST Dingkikan dan ITF Niten serta TPS3R yang telah terbangun,” ucap Bambang.

Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja berharap agar segera keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kejelasan kapan infrastruktur boleh dijalankan dan skema pencairan anggaran serta beberapa hal lainnya berkaitan dengan proyek infrastruktur.

“Kalau belum ada, tentu Pemkab sementara harus menunda paket pengadaan barang dan jasa serta penandatanganan kontrak pengadaan. Tapi, kami yakin dalam waktu dekat PMK itu akan turun,” tuturnya.